Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi

Ni Ketut Sriwinarti[1], Andres Faesal

STMIK Bumigora Mataram
wiwin1402@gmail.com[1]

Abstrak

The accuracy of the type, quantity, price, place, time and quality are the expectations of the farmers in the process of procurement and distribution of subsidized fertilizer. the various alternatives that have been given or designed apparently not able to overcome the scarcity of fertilizers that often occurs in the community. Usage of farmers Card and construction of information systems in the fertilizer distribution in districts Gerung designed with the hope that can overcome the problems that occur in particular at the line of the end and the inappropriateness in terms of subsidized fertilizer distribution. Each farmer enrolled in farmer groups and listed in RDKK which is then used by the retailer to redeem the fertilizer will receive identity cards. With the identity card of the farmers who own identity can come directly to the retailer and then the retailer can see the profil and fertilizer quota owned by each farmer. with this system, retailers can distribute the fertilizer on target in the right quantity and the right price. In addition the system also helps in viewing the redemption amount that has been done by the retailer and the amount of fertilizer sold.

Keywords : distribution control system, subsidized fertilizer, farmers card.

1. PENDAHULUAN

Tanaman Padi merupakan komoditi utama yang diproduksi petani dari sector pertanian, dimana rata-rata produksi padi sawah di kabupaten Lombok Barat tahun 2013 mencapai 54,62% (BPS-NTB, 2014). Besar kecilnya produksi padi kembali lagi sangat dipengaruhi oleh distribusi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah. PT. Petrosida Gresik merupakan distributor pupuk bersubsidi yang ada di kabupaten Lombok Barat, sedangkan salah satu pengecer resmi yang terdaftar adalah UD Aneka Tani yang berada di Kecamatan Gerung. UD Aneka Tani menaungi 2 (dua) Gapoktan yaitu Gapoktan Dewi Sri (terdiri atas 6 kelompok tani dengan 208 orang petani) dan Beriuk Patuh (terdiri atas dua kelompok tani dengan 89 orang petani). Jumlah kelompok tani yang dipercayakan pada UD Aneka Tani tahun 2015 bertambah 2 (dua) kelompok atau 1 (satu) Gapoktan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Permasalahan lain yang muncul adalah dengan semakin bertambahnya jumlah petani yang akan didistribusikan yaitu berjumlah 287 orang petani, distribusi pupuk ke orang yang terdaftar semakin sulit terutama data yang dimiliki oleh pengecer adalah kumpulan nama di setiap 1 (satu) RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) atau secara sederhana permasalahan yang dihadapi adalah "apakah pupuk yang ada sudah diberikan ke orang yang benar?".

Di dalam penelitian sebelumnya, Sriwinarti (2015) mencoba membangun sebuah sistem kendali distribusi pupuk bersubsidi yang terhubung dari Produsen, Distributor, Pengecer sampai ke Petani sehingga penjualan pupuk bersubsidi dapat tepat tujuan, stabil harga dan tersedia seperti Penjualan Bensin dan Solar pada SPBU. Sistem ini sangat sederhana yaitu setiap petani akan diberikan kartu pintar untuk menunjukkan identitasnya, yang mana setiap data petani sudah terintegrasikan mulai dari luas area, jenis tanam hingga jumlah limit pupuk yang dimiliki.

Namun apakah kartu ini dapat berguna?, dan bagaimana penerapannya dilapangan, untuk itulah penelitian ini di lakukan yaitu menguji apakah penerapan system ini dapat berhasil dan bermanfaat khususnya bagi petani.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut selain merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kebutuhan pupuk yang cukup besar, para petani yang berada di daerah tersebut sangat terbuka akan informasi yang dibutuhkan.

2.2 Sumber dan Jenis Data

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah manusia sehingga sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tambahan lain seperti dokumen dan lain-lain yang merupakan pendukung dari sumber utama. Sedangkan yang menjadi data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kasar yang akan dikumpulkan oleh peneliti dari dunia (lapangan), bahan-bahan itu berupa hal-hal khusus yang menjadi dasar analisis. Data meliputi bahan-bahan yang direkam secara aktif oleh peneliti seperti transkrip wawancara dan catatan dari lapangan berupa hasil observasi perlibatan. Informan dalam

penelitian ini adalah 208 Petani dari 6 Kelompok Tani dan 1 (satu) UD Pengecer Pupuk.

Tabel 1 Kelompok Tani

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Sawah
1	Karya Bakti	25 Orang	27.25 ha
2	Gumesa	34 Orang	34.15 ha
3	Giri Tembesi	40 Orang	27.5 ha
4	Karya Maju	25 Orang	33 ha
5	Dharma Yasa	22 Orang	25.5 ha
6	Ya Sadam	62 Orang	35.5 ha
Total		208 Orang	182.9 ha

2.3. Prosedur Pengumpulan Data

2.3.1 Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan kuisioner, catatan lapangan dan observasi mendalam peneliti.

2.3.2 Data Sekunder

Selain dari informaan, peneliti juga memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis dari dokumen yang ada pada informan atau tempat, di mana informanbertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Berbagai sumber tertulis yangmemungkinkan juga dimanfaatkan demi mendorong kenerhasilan penelitian ini yaitu : buku-buku literature, majalah atau jurnal ilmiah, arsip,dan informasi dari internet.

2.4. Analisa Penelitian

Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam penerapan kartu kendali distribusi pupuk ini adalah dengan menggunakan ceramah, demonstrasi/peragaan dan ujicoba langsung yang dimulai dari (1) tahap koordinasi dengan informan (petani); (2) menginstalasi aplikasi system informasi distribusi pupuk pada komputer yang ada di pengecer resmi dan menginputkan data terbaru berdasarkan RDKK; (3) Uji coba sistem yang mana pada tahap ini terdiri atas dua bagian, pada bagian pertama peneliti akan menguji kesiapan system yang telah terinstalasi, sedangkan pada bagian dua peneliti akan melatih staf bagian penginputan data; (4) pengenalan kartu ke petani, pada bagian ini pengabdi akan berkordinasi kembali dengan pengecer resmi dan para ketua kelompok tani. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu tahapan pertama adalah pemberian kartu tanda pemilik pupuk ke masing-masing petani, tahapan kedua adalah mengenalkan kegunaan kartu tanda pemilik pupuk, mempraktekkan cara penggunaan kartu, melatih para petani untuk dapat melihat sistem informasi yang telah terinstalasi dan dapat dilihat pada website pengecer resmi

2.5. Desain Sistem untuk proses Penebusan Pupuk

Pada saat penebusan pupuk para petani membawa kartu identitas yang telah diberikan sehingga pihak pengecer dapat melihat apakah petani tersebut memiliki jatah pupuk atau tidak. Apabila petani tersebut terdaftar dan memiliki jatah pupuk, maka proses penebusan akan dilakukan.

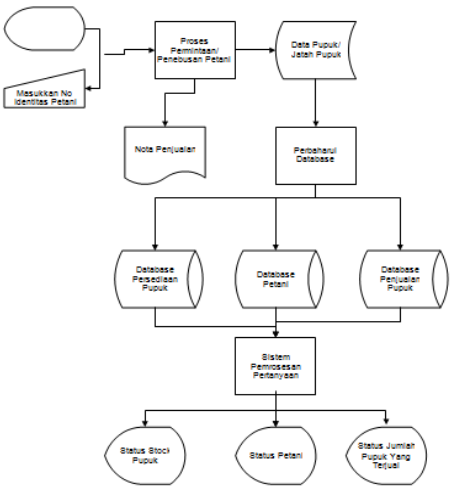

Gambar 2. Desain alur system penebusan pupuk

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Jalur atau Cara Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Petani di Kecamatan Gerung

Penyaluran pupuk bersubsidi pada dasarnya telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR. 130/11/2014 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2015. Selain itu, kios binaan atau pengecer resmi juga mendapatkan surat dari PT Petrosida Gresik berkaitan masalah proses penyaluran pupuk yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dokumen yang harus disiapkan untuk mempelancar alur distribusi pupuk dari produsen adalah RDKK, dimana RDKK yang diminta harus sudah divalidasi oleh departemen pertanian setempat. Setelah prasyarat tersebut dipenuhi barulah kios yang ditunjuk dapat menebus pupuk yang telah di tetapkan berkaitan syarat minimal jumlah penebusan. RDKK merupakan dokumen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pupuk yang disalurkan mulai dari PT Petrokimia Gresik hingga sampai ke Petani, sehingga apabila prosedur pengiriman berjalan dengan baik maka seharusnya kelangkaan pupuk tidak pernah terjadi. Namun berdasarkan hasil pengamatan dilapangan diketemukan bahwasanya kelangkaan pupuk tersebut disebabkan karena:

1) Kurangnya kordinasi antara ketua kelompok tani dengan petani yang terdaftar dalam RDKK, sehingga masih banyak diketemukan petani yang tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak

2) Mayoritas (65%) Petani terdaftar di RDKK mengerjakan tanah yang bukan miliknya (kontrak) sehingga apabila masa kontrak berakhir dan terjadi pergantiaan pengerja tanah maka data nya tidak langsung terupdate dalam RDKK
3) Di dalam beberapa kasus ditemukan kios-kios binaan yang tidak langsung (tepat waktu) dalam menebus pupuk pada PT. Petrosida sehingga petani tidak bisa membeli pupuk yang merupakan haknya.

3.2. Penggunaan Kartu Kendali

Pada prinsipnya RDKK yang sudah ada cukup membantu dari penyalur dalam mendistribusikan pupuk ke pengecer, kendala yang terjadi dilapangan adalah pada saat pengecer mengimplementasikan pupuk tersebut. Sebagai penyalur yang berhunbungan langsung dengan petani, terkadang pengecer atau kios tidak bisa secara pasti membuktikan bahwasanya memang benar bahwa petani tersebut berada dikelompok yang terdaftar dan berapa hak yang seharusnya diberikan ke masing-masing petani sesuai dengan luas lahan yang dikelola. Karena data yang diperoleh oleh pengecer adalah hanya nama. Berdasarkan permasalahan yang tim temukan, maka diperoleh solusi bahwasanya kedepan nanti dibutuhkan sebuah bukti yang digunakan sebagai tanda pengenal pemilik pupuk. Di bawah ini adalah salah satu desain kartu pengenal yang saat ini penulis rancang, untuk membantu dalam proses penyaluran pupuk sehingga petani memiliki kepastian bahwa memang dirinya berhak untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan jatah yang diberikan.

Gambar 1(a). Kartu Petani Tercetak

Di tampilan Kartu Tanda Pemilik Pupuk (KTPP) terlihat adanya nama UD (kios binaan tempat petani membeli pupuk haknya), no id petani, nama petani, nama kelompok tani, nama gabungan kelompok tani dan desa tempat petani tersebut berada. Sedangkan didalam database selain terdapat informasi sesuai dengan kartu, juga terdapat informasi mengenai jumlah pupuk yang merupakan "jatah" pemilik kartu yang mana jumlahnya akan terupdate per musim atau pada saat pembelian dilakukan. Namun pada saat penerapan kartu petani dilapangan, ditemukan beberapa anomali-anomali, dimana diantaranya yaitu terdapat beberapa petani yang ternyata terdata di lebih dari satu RDKK, sehingga dia mendapatkan jatah pupuk lebih dari yang seharusnya. Namun juga terdapat petani yang tidak tahu jika namanya berada di lebih dari satu RDKK. Dengan diterapkan sistem ini, pembaharuan data telah dilakukan sehingga dapat memperkecil kesalahan dalam pembagian pupuk bersubsidi di lapangan.

3.2. Ketepatan Jumlah dan Jenis

Kelangkaan pupuk merupakan permasalahan yang sering muncul khususnya di desa Gerung. para petani sering mengeluhkan berkaitan ketiadaan pupuk yang ada di pasaran, sedangkan dari pihak produsen mengungkapkan bahwasanya mereka telah memproduksi sesuai dengan anggaran yang diberikan (disusun) oleh masing-masing daerah. Apabila ditelusuri langsung ke petani di ketahui bahwasanya para petani tidak mengetahui kemana seharusnya dia membeli pupuk yang merupakan bagiannya, selain itu terdapat k etidakjelasan di lini pengecer mengenai berapa seharusnya hak pupuk yang seharusnya diberikan untuk masing-masing petani.

Apabila merujuk dari peraturan Menteri no 122/Permentan/SR.130/11/2013 yang mengungkapkan bahwasanya kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifikasi lokasi dengan pertimbangan usulan yang diajukan oleh dinas Provinsi kepada direktur jenderal. Berdasarkan peraturan tersebut maka dalam system ini dirancang pembagian (penjatahan) pupuk ke masing-masing petani adalah sesuai dengan kepemilikan tanah yang dimiliki yaitu misalkan luas tanah yang dimiliki adalah 10 are, maka sesuai dengan ketetapan dari dinas pertanian bahwasanya setiap 10 are tanah yang dimiliki akan menerima 20 kg urea, 10 kg NPK, 5 kg Za, 10kg SP-36 dan 50 kg Organik. Sehingga secara otomatis apabila semakin luas tanah yang dimiliki maka semakin banyak hak pupuk yang diberikan.

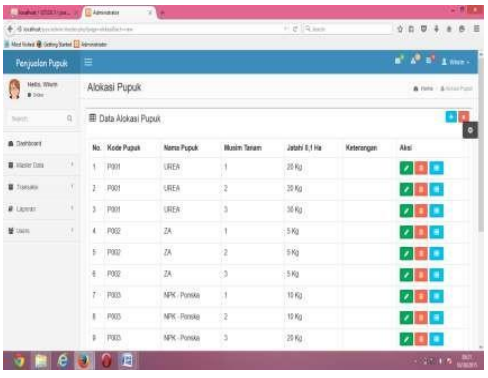

Gambar 3. Layout Alokasi pupuk

3.3. Ketepatan Harga

Produk yang disubsidi oleh pemerintah, jumlah maupun harganya sudah ditetapkan oleh peraturan menteri atau badan pemerintah. Pupuk subsidi seperti Urea, ZA, NPK dan SP-36 memiliki harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh

Menteri dalam peraturan Menteri yang diterbitkan setiap satu tahun sekali. Namun praktek dilapangan menunjukkan seringnya terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan [2]. Dengan adanya sistem ini, harga eceran pupuk sudah ditetapkan sehingga pengecer akan mengikuti asas dan tidak ada perbedaan antara petani satu dengan yang lainnya.

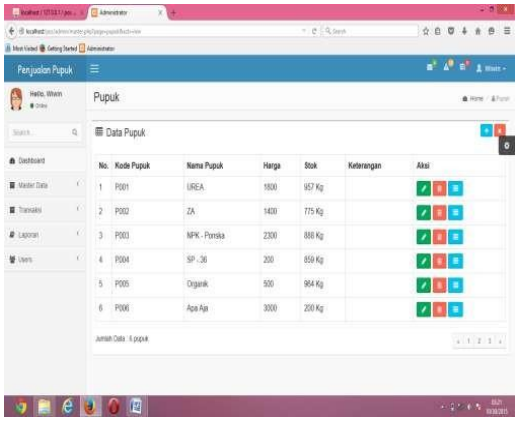

Gambar 4. layout persediaan pupuk

3.4. Ketepatan Sasaran

Salah satu tujuan yang diharapkan pada saat penyaluran pupuk adalah adanya mata rantai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga pupuk yang dibutuhkan oleh petani mudah dijangkau dan efisien [4]. Namun permasalahan yang sering muncul pada saat pendistribusian pupuk adalah siapa yang memiliki hak akan pupuk tersebut. Di dalam RDKK yang diterima oleh pengecer, hanya terdapat nama petani dan jumlah pupuk yang akan diterima. Para pengecer sering mengalami kebingungan apakah benar orang yang datang saat melakukan penebusan pupuk adalah orang yang benar. Besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam pemberian pupuk ataupun satu orang bisa mendapatkan lebih dari satu kali atau tidak sama sekali. Dengan adanya system ini, admin akan menginputkan data petani sesuai sengan informasi yang diberikan, kemudian para petani akan dibagikan kartu petani yang menunjukkan identitas para petani, dimana pada saat akan melakukan penebusan (pembelian) pupuk, petani menunjukkan kartunya ke pengecer.

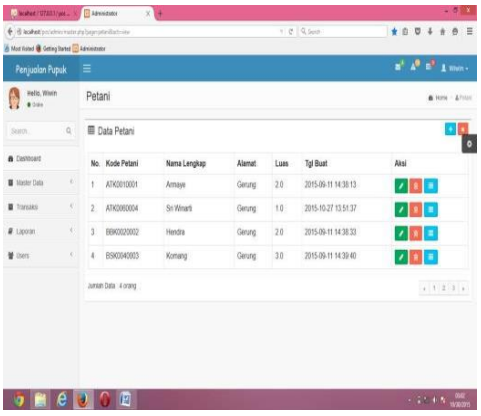

Gambar 5. Data Petani

3.5. Ketepatan Informasi Persediaan

Selain ketepatan-ketepatan yang dijabarkan pada point-point sebelumnya, sistem ini juga dapat membantu melihat secara cepat mengenai jumlah pupuk yang tersedia di gudang. Untuk setiap jenisnya

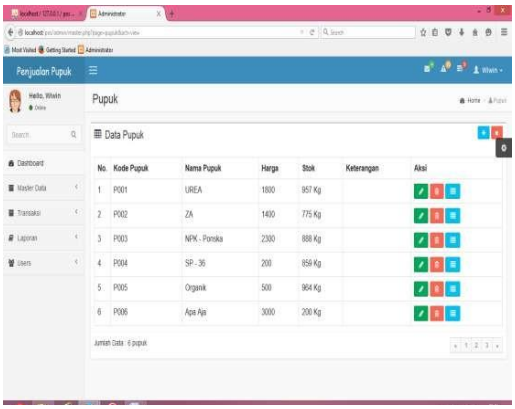

Gambar 6. Stock Pupuk

3.6. Ketepatan Nilai Penebusan

Menu penjualan dan pembelian yang dirancang dapat membantu pengecer dalam memproses transaksi pembelian pupuk dan transaksi penjualan pupuk sehingga dapat dihasilkan laporan yang menunjukkan berapa jumlah pupuk yang dibeli (ditebus) oleh pengecer dan berapa jumlah pupuk yang terjual oleh pengecer. Di laporan penjualan ditunjukkan siapa saja petani yang melakukan pembelian pupuk dan berapa jumlahnya.

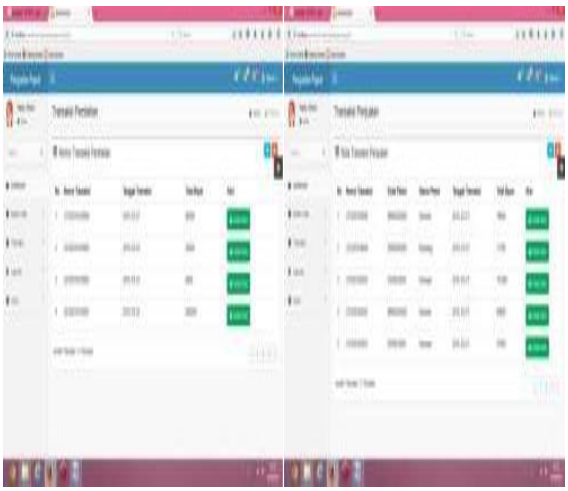

Gambar 7. Menu Pembelian dan Penjualan

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwasanya RDKK yang selama ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengendalian distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal, mulai dari terkendala masalah data dalam RDKK maupun pada saat implementasinya. Sedangkan pada saat penyaluran masih diketemukan adanya perbedaan harga dari yang ditetapkan. Sehingga dibutuhkan cara lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan dibuatnya kartu cerdas (kartu tanda pemilik pupuk) yang merupakan identitas pemilik pupuk serta hak yang dimiliki. Selain itu System pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan alternative system yang ditawarkn untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat khususnya diwilayah kecamatan Gerung. System ini memberikan ketepatan pada saat proses penyaluarn pupuk yaitu ketepatan jumlah pupuk yang terbagi, ketepatan jenis pupuk yang diberikan, ketepatan harga pupuk sesuai dengan peraturan Menteri dan ketepatan sasaran atau tepat ke konsumen pupuk. Petani juga diberikan identitas (kartu petani) yang dapat digunakan sebagai tanda pengenal pada saat proses pembelian pupuk ataupun bantuan-bantuan yang akandiberikan nantinya.

Selain membantu dari pihak petani, system ini juga dirancang untuk membantu pengecer, dimana melalui system ini dapat di informasikan secara cepat dan tepat berkaitan jumlah persediaan pupuk, jumlah pembelian pupuk yang telah dilakukan dan nilai penjualan pupuk perperiode.

4.2. Saran

Penelitian ini hanya menggunakan satu pengecer saja, sehingga pengendalian distribusi pupuknya tidak bisa dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu dibutuhkan lebih dari satu pengecer. Selain itu penelitian ini juga bisa dikembangkan dengan membangun aplikasi berbasis android, dimana informasi ketersediaan pupuk setiap pengecer dapat terlihat bukan hanya oleh pemilik kios tetapi juga oleh petani.

Daftar Pustaka

Agromedia, Redaksi, 2007, Petunjuk Pemupukan. PT Agromedia Pustaka, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014. Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat Pada Triwulan IV 2013. No 13/02/52/th.VIII. http://ntb.bps.go.id/data_uploads/brs/brs-2014-02-05- pdrb.pdf.

Darwis, V. dan Ch. Muslim. 2007. Revitalisasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* XV (2): 141 – 168.

Hollensen, S. 2010. Marketing Management: A Relationship Approach. 2nd ad., Harlow, Essex: Person.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

Safitri, Meliana Ayu, Bambang Supriyono, dan Heru Ribawanto. 2013. Distribusi Pupuk Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik* (JAP), Vol 1, No. 1.

Sudjono, Spudnik. 2011. Sistem Distribusi Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani. *Analisa Kebijakan Pertanian*. Volume 9. No 4, Des 2011: 313 – 330

Watiha, A. Hamid. A. Yusra dan Dewi Kurniati, 2012. Analisis Saluran Distribusi dan Efesiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Selakau Sambas. JurnAL Sosial Ekonomi Pertanian Volume 1, Nomor 3, Desember 2012, hlm 37 – 48.